

KABUPATEN PESISIR SELATAN

SKPD PELAKSANA : 1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. PENANAMAN MODAL

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	100 %
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/285/Kpts/BPT-PS/2017 Tanggal 22 mei 2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari 120 SOP yaitu. - SOP Perizinan Bidang Pekerjaan Umum. - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) - SOP Perizinan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar: - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - Tanda Daftar Industri (TDI) - Izin Usaha Industri (IUI) - Tanda Daftar Gudang (TDG) - SOP Perizinan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. - Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum - Izin Trayek Angkutan Pedesaan - Izin Jasa Titipan untuk Kantor Agen - Izin Layanan Penerbitan, Penyiaran TV/Radio dan Penyiaran TV Kabel. - Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi	SOP Ada 140 SOP

¹ Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						f. Izin Operasional Menara Telekomunikasi g. Izin Usaha Layanan Internet/Warung Internet h. Izin Usaha Jasa Multimedia i. Izin Usaha Jasa Layanan Wi-Fi Hotspot dan RT/RT net 4. SOP Perizinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. a. Izin Usaha Penggilingan Padi Huller b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) c. Izin Usaha Pabrik Pengolahan (IUP-P) d. Izin Usaha Perkebunan Budi Daya (IUP-B) e. Izin Usaha Tanda Daftar Perkebunan Budidaya (STDPB) 5. SOP Perizinan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. a. Izin Usaha Peternakan Komersil Sapi Potong dan Sapi Bibit b. Izin Usaha Peternakan Komersil Ayam Pedaging, Kemitraan antara inti dan Plasma c. Izin Usaha Peternakan Rakyat Sapi Potong dan Sapi Bibit d. Izin Usaha Peredaran Obat Hewan (Toko/Depo/Kios) e. Izin Usaha Peternakan Rakyat Ayam Petelur dan Ayam Potong f. Izin Usaha Peternakan Rakyat Ayam Pedaging Kemitraan antara inti dan Plasma g. Izin Praktek Medis/para Medis (Dokter Hewan) 6. SOP Perizinan Bidang Energi dan Sumber Mineral. a. Izin Tangki Timbun b. Izin Usaha Penumpukan Gas Alam Cair/Elpiji (Agen) 7. SOP Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan. a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) c. Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI) 8. SOP Perizinan Bidang Parawisata. a. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata b. Tanda Daftar Usaha Jasa Akomodasi c. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman d. Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Parawisata e. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Parawisata f. Tanda Daftar Usaha Jasa Daya Tarik Wisata	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						g. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi h. Tanda Daftar Usaha Jasa Paramu Wisata i. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran j. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Parawisata k. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Wisata l. Tanda Daftar Usaha Jasa Wisata Tirta m. Tanda Daftar Usaha Jasa SPA 9. SOP Perizinan Bidang Kesehatan. a. Izin Mendirikan Rumah Sakit b. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus c. Izin Mendirikan Rumah Sakit Sementara d. Izin Operasional dan Klarifikasi Rumah Sakit e. Izin Klinik Bersalin f. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan g. Izin Klinik h. Izin Kerja Dokter i. Izin Praktek Dokter j. Izin Kerja Bidan k. Izin Praktek Bidan l. Izin Kerja Perawat m. Izin Praktek Perawat n. Izin Tukang Gigi o. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) p. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) q. Izin Apotik r. Izin Kerja Refraksionis Optisien s. Izin Optikal t. Izin Toko Obat u. Surat Izin Pengobatan Tradisional v. Izin Praktek Fisiothrapis w. Izin Depot Isi Ulang Air Minum 10. SOP Perizinan Bidang Tata Pemerintahan. a. Izin Gangguan/HO b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) c. Izin Lokasi	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						11. SOP Perizinan Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. a. Izin Pemasangan Papan Reklame 12. SOP Perizinan Bidang Lingkungan Hidup. a. Izin Lingkungan b. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air (IPLC) c. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 13. SOP Perizinan Bidang Pendidikan. a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal 14. SOP Perizinan Bidang Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi. a. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta (LPKS) b. Izin Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta (LPKS) c. Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja d. Izin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Kerja (LPK) 15. SOP Perizinan Bidang Penanaman Modal. a. Izin Prinsip Penanaman Modal b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal d. Izin Usaha Penanaman Modal e. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal f. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal g. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 570/18/Kpts/DPMPTSP-PS/2017 tentang SOP Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 8 Nopember 2017 yang terdiri dari 51 SOP. 1. SOP Pengurusan Surat Masuk 2. SOP Pengurusan Surat Keluar 3. SOP Pengajuan Nota Dinas	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						4. SOP Pengajuan Surat Tugas Dalam Propinsi 5. SOP Pengajuan Surat Tugas Luar Propinsi 6. SOP Pengumpulan Data Aset 7. SOP Pengadaan Barang Aset dan Habis Pakai (LS) 8. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 9. SOP Pengidentifikasian Aset 10. SOP Penginventarisir Aset 11. SOP Permintaan ATK 12. SOP Penghapusan Aset 13. SOP Penyimpanan/Arsip 14. SOP Pemeriksaan Barang 15. SOP Pengajuan Permintaan GU 16. SOP Pencairan Dana 17. SOP Penyerahan Dana Kegiatan Oleh Bendahara 18. SOP Pencatatan Transaksi pada BKU 19. SOP Pengentrian Data Keuangan pada Aplikasi SIPKD 20. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 21. SOP Penyusunan Renstra 22. SOP Penyusunan Renja 23. SOP Penyusunan RKA 24. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja 25. SOP Penyusunan LAKIP 26. SOP Penyusunan LKPj 27. SOP Penyusunan LPPD 28. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal 29. SOP Izin prinsip Perubahan Penanaman Modal 30. SOP Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 31. SOP Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal 32. SOP Izin Usaha/IUT Penanaman Modal 33. SOP Izin Usaha/IUT Perubahan Penanaman Modal 34. SOP Izin Usaha/IUT Perluasan Penanaman Modal 35. SOP Izin Usaha/IUT Penggabungan Penanaman Modal 36. SOP SPT Survey Lokasi/Lapangan 37. SOP Survey Lokasi/Lapangan 38. SOP Surat Masuk Pengaduan 39. SOP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 40. SOP Penyusunan Data Perkembangan Penanaman Modal 41. SOP Penyusunan Data Perkembangan Investasi 42. SOP Penyusunan Data Perizinan	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						43. SOP Pengumpulan Data Penanaman Modal 44. SOP Pengumpulan Data Investasi 45. SOP Pengumpulan Data Perizinan 46. SOP Pengadministrasian Data Promosi 47. SOP Operator Komputer Data Promosi 48. SOP Penyajian Data Promosi 49. SOP Pengadministrasian Data Investasi 50. SOP Operator Komputer Data Investasi 51. SOP Operator Data Investasi	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN) ttg SPM	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100 %	- Perda Pelaksanaan 0 - Perda yang seharusnya 0 - Perbup ttg SPM belum ada, yang ada Berupa. 1. Surat Keputusan Kepala Dinas nomor 570.4/Kpts/DPMPTSP-PS/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017	0 % (Perda belum ada, yang ada berupa Peraturan Bupati dan SK Bupati)
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 22 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.569 personil	0,28 %
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 15 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.	52,94 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 6 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. Laporan Kinerja 4. RKA 5. DPA 6. CALK	6 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 Program	100 %
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 4.057.872.963.-,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 3.861.155.305.-	95.15 %
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 359.231.500.- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.013.726.467,-	17.9 %
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 10.680.000.- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.490.111.467,-	0.7 %
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 10.680.000.- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.013.726.467,-	0.5 %
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. CALK 2. Neraca 3. LRA 4. Laporan Fungsional	Ada sebanyak 5 jenis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						5. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SIPKD) yaitu. Laporan Barang Milik Daerah yang terdiri dari: - Rekapitulasi Daftar Mutasi - KIB A, B, C, D, E, F - dll	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 924.334.764.47,- asset.	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/ prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Informasi 2. Email Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu www.kpmpt-pessel@yahoo.co.id 3. Spanduk 4. Baliho	Jumlah sebanyak 4 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang tentang Peningkatan Pelayanan sebanyak 150 responden	ada